

Harga Mati untuk Korupsi

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

"RASA hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai..."

BEGINILAH gambaran yang dapat ditangkap melalui fenomena korupsi yang terjadi di negeri ini. Di mana antara harapan dan kenyataan yang terjadi sungguh berbanding terbalik, di satu pihak masyarakat sebagai elemen bangsa mempunyai keinginan yang kuat untuk bersih-bersih diri dari korupsi, tetapi di pihak lain pejabat sebagai pemegang amanah rakyat tampaknya lebih cenderung menjadikan korupsi sebagai hobi yang sangat digemari.

Sapa lagi yang dapat dijadikan tumpuan dan harapan bagi rakyat di negeri ini, apabila para pejabatnya sendiri sudah menjadikan korupsi sebagai jati diri dan bagian dari profesi. Sikap para pejabat yang cenderung melakukan korupsi sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa, sungguh

despotik telah mencoreng dan mencederaikan hati nurani rakyat yang paling dalam.

Para pejabat mulai dari akademisi dan poli-

isi, dari kampus sampai rumah-rumah tinggi terindikasi terjebak dalam lingkaran korupsi. Perilaku yang diharapkan secara nyata dan bertanggung memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, malah sebaliknya lebih memprioritaskan kepentingan sendiri daripada kepentingan negeri ini. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pejabat di Indonesia sangat identik dengan korupsi.

Sapa yang sebenarnya tidak mau menjadi pejabat? Dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang sudah luar biasa dapat diperolehnya dari negara. Sebenarnya selain hak yang sungguh istimewa ini, pejabat pada dasarnya juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah mudahnya. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pejabat. Pejabat merupakan orang-orang terpilih, yang memiliki napsu dan fungsi pokok sebagai penyelenggara negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Dalam sistem pemerintahan yang ada, menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 mengenai jabatan, bahwa pendidikan jabatan di Indonesia ialah menggunakan prinsip *merit* (separa-

tion of power), yaitu legislatif (*rule-making function*), eksekutif (*rule application function*), dan yudikatif (*adjudication function*). Di mana yang dinamakan pejabat itu adalah orang-orang yang menempati posisi antara lain, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan ketua, wakil ketua, dan anggota DPA; ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai dubes luar biasa dan berkassa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang.

Memasuki era keterbukaan seperti saat ini, para pejabat sebagai bagian dari elite politik, ternyata banyak sekali yang terjebak dalam lingkaran korupsi, baik secara individual maupun berjamaah. Pengelolaan uang negara yang tidak transparan merupakan faktor utama dan pertama penyebab para pejabat

terlibat tindak korupsi. Proyek-proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, disponsori dikelola melalui hubungan kerib yang tertutup guna untuk dapat diuraikan. Betul saja akibat dari perbuatan tersebut, hal hasil menimbulkan kesulitan pembangunan, ekonomi, serta memuat kualitas pelayanan dari pemerintahan terpuruk.

Untuk mencegah hal tersebut agar tidak terus berlangsung dan menghantui negeri ini, maka cara satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan memberikan tindakan keras dan tegas terhadap para pejabat yang melakukan korupsi, yang mana sudah sepatutnya para pejabat yang berlaku korup untuk disingkirkan.

Di samping juga, adanya kemauan bersama untuk melakukan cara-cara pemertanian yang berdasarkan ketertarikan, serta kegiatan pengawasan yang mengikat dan berapain harus terus dapat ditingkatkan demi menjaga terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Sehingga pada akhirnya, cara-cara untuk melahirkan kehidupan birokrasi Indonesia yang jujur, bersih, dan amanah dapat terwujud dengan baik, sesuai dengan cita-cara yang diusung Indonesia dalam membangun "landmark" di dunia ini.

Berani jujur itu hebat, yang mana merupakan suatu bentuk akhlak mulia bagi masyarakat Indonesia untuk membangun korupsi sebagai musuh bersama.

Sejak jadi pejabat, makin mewah aja hidupnya Pak, apa sih resepnya...

Yang penting kita tidak minta uang ke rakyat langsung, kita hanya makan uang negara saja...



(19)

Sehat itu Mahal!

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.
Magister Bidang Pendidikan Bahasa,
Sastra Indonesia dan Daerah

Tangisan untuk Negeri

Hitam negeriku
negeriku, negeri hitam
tidak ada cahaya di sana
semuanya hitam, kelam tanpa warna

Apakah masih ada cinta di negeriku?
cobalah kau tanya pada kerut
wajah tua di lorong sana
dan dengarkanlah dirinya bercerita
tentang senyum ayahnya kaum jelata
atau duka nestapa anak-anak para
janda

Oh, kenapa negeriku ini?
sedih tertakbur bara bara
terhempas larut gelombang derita
ini pasti lah ulah para durjana!
penghap darah rakyat jelata
pengikis habis jiwa di dada

Lapi apa yang bisa aku buat!
aku hanyalah daun kering
kumpulan sampah tak berguna
hanya bisa bermandi air mata
moga cahaya cinta Tuhan di jiwa
jatuh menembus hati negeriku
yang merana...

BANGSA yang kuat, tentu saja adalah bangsa yang sehat. Begitu besarnya peranan dari kesehatan, sampai-sampai lahir satu semboyan 'lebih baik mencegah dari pada mengobati'. Lahirnya semboyan 'lebih baik mencegah' dari pada mengobati di kalangan masyarakat Indonesia, disebabkan istilah 'sakit' sangat identik dengan biaya yang mahal. Sehingga tersebut sungguh telah berdampak luas di dalam masyarakat, dengan perspektif bahwa orang miskin itu dilarang keras untuk

sakit. Hal ini muncul, dikarenakan tidak terjangkau biaya kesehatan bagi golongan masyarakat kelas bawah.

Melihat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan begitu terbatas. Maka sudah sepatutnya bagi pemerintah yang merakyat, untuk mengedepankan suatu program kesehatan gratis bagi segenap masyarakat.

Melalui program kesehatan gratis ini, diharapkan nantinya masyarakat akan memiliki satu jaminan kesehatan yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja apabila diperlukan, baik di lingkungan rumah sakit maupun di pusat kesehatan masyarakat. Di mana jaminan kesehatan gratis ini, merupakan kunci pondasi untuk menjamin keberadaan suatu masyarakat Indonesia yang kuat.

Pelayanan Prima

Mewujudkan Indonesia sehat merupakan harapan, dambaan, impian, dan cita-cita kita bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu terobosan, yaitu di bidang kesehatan, yaitu berupa reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan merupakan cara terbaik untuk mengubah bentuk pelayanan kesehatan yang lama, menjadi bentuk pelayanan yang prima.

Pelayanan prima (*excellent service*) merupakan bentuk pelayanan yang paling baik yang dapat diberikan suatu lembaga/organisasi terhadap pihak yang dilayani (pelanggan). Dikatakan paling baik, dikarenakan pelayanan prima yang ada telah memiliki standar pelayanan yang baik dan berlaku secara umum. Di mana pelayanan prima tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan kepuasan yang baik sesuai dengan harapan pelanggan, tanpa ada faktor-faktor yang harus menyulitkan (Satopo dan Suryana, 2006).

Lembaga Administrasi Negara (2006) beranggapan, bahwa kriteria-kriteria utama yang harus terlihat dari suatu bentuk pelayanan prima, antara lain:

a) Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.

b) Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan

menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan, dan tepat dalam hal waktu.

c) Tanggung jawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, serta menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.

d) Kecakupan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

e) Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas, petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon dan internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan, juga harus diperhatikan.

f) Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan. Keramahan hanya diperlukan jika pelanggan termasuk dalam konsumen kontrol. Sebaliknya, pihak penyedia layanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan jika layanan yang diberikan tidak dikonsumsi secara langsung melalui kontak langsung.

g) Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gampang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain.

h) Komunikasi antara petugas dan pelanggan, komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang benar-benar dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti.

i) Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercaya, adanya kejujuran kepada pelanggan, dan kemandirian

penyedia pelayanan untuk menjaga pelanggan tetap setia.

j) Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, serta jadwal dan waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan.

k) Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-rugian, jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, finansial, dan kepercayaan pada diri sendiri.

l) Mengerti apa yang diharapkan pelanggan, hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan memberikan perhatian secara personal.

m) Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas yang baik, adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, mutu pelayanan, dan fasilitas penunjang lainnya.

n) Efisien, yaitu bahwa penyediaan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara pelayanan dengan produk pelayanan.

o) Ekonomis, yaitu agar pengadaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

Melalui pelaksanaan pelayanan prima yang baik, terlihatlah visi dan misi ke depan dari pemerintah yang merakyat guna untuk mewujudkan keberadaan Negara Indonesia yang sehat. Di mana hal tersebut, sungguh sangat berguna untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejuk serta sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. (*)

3 Pilar, Pemimpin yang Merakyat!

"Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada, dari, oleh, dan untuk rakyat. Begitulah sebaiknya tujuan dan tekat hidup dari pemimpin yang merakyat."

Oleh Vehbi Andra, M.Pd.

TENTU saja selama ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan suatu pemerintahan dapat digolongkan sebagai good governance atau tidak? Pertanyaan tersebut, sebenarnya sungguh sangat mudah untuk dijawab oleh berbagai elemen aparatur pemerintahan di negara ini.

Suatu pemerintahan dapat digolongkan sebagai good governance indikatornya sangat jelaslah apabila pemerintahan tersebut dipimpin oleh pemimpin yang merakyat. Dimana sebenarnya pemimpin tersebut merupakan bagian dari aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan murah, dalam fungsinya sebagai penyelenggara tugas negara, pemerintah, dan pemerintahan.

Menjadi good governance bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh karena, hal ini memerlukan suatu komitmen yang kuat, daya tahan yang lama, dan waktu yang tidak singkat dalam proses pembelajaran, pendidikan, serta implementasi dari nilai-nilai dari pemerintahan yang ada oleh seluruh elemen bangsa, baik dari aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Di samping, perlu adanya kolaborasi bersama dan rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa, bahwa good governance dapat diwujudkan dari pencapaian masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Soenaryo dan Nasri, 2009).

Wawasan, kedekatan (proximity), keterbukaan dan transparansi (open-

ness and transparency), partisipasi masyarakat (participation), tanggung gugat (accountability), superioritas hukum (rule of law), demokrasi (democracy), profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency), daya tanggap (responsiveness), keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness), desentralisasi (decentralization), kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership), komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality), komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection), dan komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market), merupakan unsur-unsur penting yang harus tergambar dalam suatu good governance (Rappenas).

Di era sekarang ini good governance, yang menggambarkan visi dan misi dari pemimpin yang merakyat, tentu saja bercorak secara keseluruhan melalui tiga pilar pembangunan, yaitu berupa pendidikan, kesehatan gratis, dan ekonomi kerakyatan. Dimana melalui pelaksanaan yang baik dan menyeluruh terhadap tiga pilar ini, barulah dapat terlihat secara jelas jika besar kepercayaan yang dimiliki pemimpin yang merakyat.

Pendidikan Gratis

Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk penanaman nilai-nilai atau satu-satunya cara untuk membina manusia seutuhnya. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan manusia, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotorik), bagi peranannya nanti di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Unesco memantapkan bahwa anak pendidikan seharusnya memperoleh pada tingkat yang lebih tinggi tingkat pengetahuan, landasan ilmu pengetahuan, learning to do (belajar untuk bekerja), aplikasi, learning to be (belajar untuk menjadi), pengalihan potensi diri, dan learning to life together (hidup bersama dan sekaligus berkeadilan), hidup berkeadilan

dan bersahabat antarbangsa.

Begitu pentingnya pendidikan, maka suatu bentuk pemerintahan yang baik (good governance), seharusnya akan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, baik dari segi materiil maupun non-materiil. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki fungsi yang amat besar untuk memberikan kesadaran kepada manusia tentang kebenaran-kebenaran hidup, memberikan kebebasan dan kepuasan batin, mampu membina kehidupan secara universal, dapat memenuhi kebutuhan terhadap nafuri kehidupan, dapat memberikan pengetahuan yang mendalam terhadap apa yang diketahui, dan bahkan dapat menolong manusia itu sendiri menjadi manusia yang bertadaya, yakni manusia yang responsif terhadap nilai-nilai kezhuran budi (Susuri, 2007).

Melihat sangat besarnya peran pendidikan bagi kepentingan bangsa dan negara, maka sudah natut dan selayaknya bagi pemimpin yang merakyat untuk memunculkan suatu program pemerintah, yang berbasis pada pendidikan gratis bagi segenap elemen bangsa yang mencakup wajib belajar dari jenjang SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) sederajat. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin pemerataan dan kesempatan yang sama bagi segenap masyarakat, agar dapat mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan Gratis

Bangsa yang kuat, tentu saja adalah bangsa yang sehat. Begitu besarnya peranan dari kesehatan, sampai-sampai lahir satu semboyan "lebih baik mencegah daripada mengobati". Semboyan ini muncul disebabkan istilah "sakit" sangat identik dengan biaya yang mahal. Stigma yang berkembang luas di masyarakat, menyatakan bahwa orang miskin itu dilakuk sebagai orang sakit. Hal ini muncul, dikarenakan oleh sangat tinggi dan tidak terjangkau biaya kesehatan bagi kalangan masyarakat kelas bawah.

Melihat akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan begitu sulit dan terbatas. Maka sudah sangat pas dan sepatutnya, bagi pemimpin yang merakyat untuk mengedepankan suatu program kesehatan yang gratis bagi segenap masyarakat.

Melalui program kesehatan gratis ini, diharapkan nantinya masyarakat akan memiliki satu jaminan kesehatan yang lengkap dan dapat digunakan kapan saja apabila diperlukan, baik di tingkat Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), maupun RS (Rumah Sakit). Dimana jaminan kesehatan gratis adalah hal utama dan pertama, serta merupakan kunci penting untuk menjamin keberadaan suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang sehat.

Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan ekonomi merupakan kunci penting keberhasilan dari pembangunan. Ekonomi yang kuat, tentu saja menjadi penopang pembangunan di suatu negara. Agar memunculkan keunggulan ekonomi, maka diperlukan suatu keharmonisan bagi pemimpin yang merakyat, untuk melahirkan suatu program yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan merupakan program unggulan, guna untuk membuka kesempatan minat usaha di kalangan masyarakat. Fokus sasaran dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan adalah berfokus terhadap UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu berupa bantuan dana untuk pengembangan UKM sebesar 1 miliar per kabupaten/desa. Dengan berfokus terhadap program ekonomi kerakyatan, diharapkan nantinya masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, guna untuk membuka lebih keberadaan bangsa dan negara yang kuat.

Melalui tiga pilar pembangunan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan ekonomi kerakyatan, terdapat visi dan misi ke depan dari pemimpin yang merakyat. Dimana hal ini menginspirasi masyarakat untuk melahirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan negara. (P)

Pesan Guru untuk Pendidikan

"MENJADI harapan kita bersama untuk menghadirkan pendidikan Indonesia yang bermutu, dalam rangka menyiapkan generasi muda yang profesional pada masa depan, generasi yang siap bersaing pada era globalisasi."

Oleh: Wahyu Andra, M.Pd.

PENDIDIKAN adalah upaya pertama dan utama untuk membangun manusia semuanya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan salah satu cara untuk memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan manusia, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotorik), bagi perserta didik di dalam kehidupan sebangsa dan bernegara.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, menyatakan bahwa anak pendidikan seharusnya bertumpu pada *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to do* (belajar untuk melakukan), *learning to be* (belajar untuk menjadi), *learning to live together* (hidup bersama dan sekaligus berkompetisi hidup berdampingan dan bersahabat sesama bangsa). Begitu pentingnya pendidikan, maka suatu bentuk pemerintahan yang baik (*good governance*), seharusnya akan mampu memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, baik dari segi materi maupun nonmateri.

Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki fungsi yang amat besar untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang kebenaran-kebenaran hidup, memberikan kebebasan dan kepuasan hati, mampu menunjukkan kehidupan secara universal, dapat mencapai seluruh aspek kehidupan, dapat memberikan pengabdian yang mendidik serta dapat apa yang diketahui, dan bahkan dapat menolong manusia sendiri menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan budi (Samsir, 2007).

Melihat sangat besarnya peran pendidikan bagi kepentingan bangsa dan negara, maka sudah seharusnya

selayaknya bagi pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk memunculkan suatu program pendidikan yang unggul lagi sebagaimana bangsa, baik dari jenjang SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan PT (Perguruan Tinggi). Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin pemerintahan mutu pendidikan yang sama bagi segenap masyarakat Indonesia, sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945. Dua faktor mendasar yang menjadi kunci sukses keberhasilan dunia pendidikan, adalah terdapat pada ketersediaan guru yang profesional dan juga adanya sarana-prasarana yang bermutu.

Guru Pahlawan Hati

Guru yang hebat adalah guru yang profesional (guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan). Di mana tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menurut Sudarwan (2010) secara umum guru haruslah memiliki kompetensi dasar utama, berikut:

1) Kompetensi pedagogik: a) memahami peserta didik secara mendalam (memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bakat-bakat awal peserta didik), b) merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran (memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih), c) melaksanakan pembelajaran (menyusun dan/atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif), d) memantau dan melaksanakan evaluasi pembelajaran (memantau dan melaksanakan evaluasi hasil belajar dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat pencapaian belajar peserta didik), dan e) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya (memfasilitasi peserta didik

untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik).

2) Kompetensi kepribadian: a) kepribadian yang mantap dan stabil (bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma), b) kepribadian yang self controlling (tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan ketertarikan dalam berpikir dan bertindak), c) kepribadian yang berwibawa (memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani), dan d) beradab (mulia dan dapat menjadi teladan bertindak sesuai dengan norma religius (iman, takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik).

3) Kompetensi sosial: a) mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik (berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, b) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan (mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan), c) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar), dan d) menguasai standar dan metode keilmuan (menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi budaya studi).

Berikut besarnya peranan guru bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia, maka sudah patut dan selayaknya bagi pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk memberikan perhatian yang sangat khusus kepada guru. Baik yang berupa program-program guru, peningkatan mutu guru (kompetensi guru), maupun program-program yang bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari guru. Karena dengan profesionalitas seseorang itu akan meningkat, apabila kebutuhan hidupnya telah terpenuhi dengan baik.

Sarana-Prasarana Bermutu

Selain keberadaan guru yang profesional, sarana-prasarana yang

bermutu juga merupakan kunci penting keberhasilan dari dunia pendidikan. Sarana-prasarana yang baik tentu saja menjadi penunjang utama pendidikan di suatu negara. Agar memunculkan suatu keunggulan dari dunia pendidikan, maka diperlukan suatu perhatian bagi pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk menjamin ketersediaan sarana-prasarana yang jitu bagi kesuksesan dunia pendidikan Indonesia.

Menurut Sudarwan (2010) sarana-prasarana yang harus tersedia guna menjamin keberhasilan dunia pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Jenis dan jenjang pendidikan (tersedia jenis dan jenjang pendidikan dengan beragam keahlian yang disiplin ilmu yang tidak hanya kompetitif, akan tetapi juga relatif sama dengan yang ditawarkan negara lain).

2) Mutu pendidikan (mutu proses dan hasil pendidikan secara nasional setara dengan mutu sejenis yang dicapai di negara lain).

3) Sumberdaya (tersedianya sumberdaya internal dan eksternal pendidikan yang memenuhi kuantitas, jumlah dan kualitas).

4) Toko buku (tersedia pusat penjualan buku yang lengkap dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan).

5) Sumber informasi (adanya pusat-pusat informasi yang lengkap, edukatif dan representatif).

6) Lingkungan belajar (terdapat lingkungan belajar kondusif).

7) Kondisi politik dan ekonomi masyarakat (adanya kondisi politik dan ekonomi masyarakat yang baik).

8) Jaringan informasi (tersedianya jaringan informasi yang luas).

9) Biaya hidup dan pendidikan (adanya pemondokan dan biaya hidup yang relatif terjangkau).

10) Sarana transportasi (tersedianya sarana transportasi yang baik dan terjangkau).

11) Dukungan (adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk kepentingan pendidikan).

12) Pengakuan masyarakat (adanya penghargaan yang baik dari berbagai pihak atas hasil dan mutu pendidikan).

Selanjutnya, keberadaan guru yang profesional dan sarana-prasarana yang bermutu adalah plan mutunya dunia pendidikan Indonesia akan meningkat. Melalui keberadaan guru yang profesional yang cerdas, berakhlak, jujur, dan amanah, serta dapat menginspirasi kehidupan masyarakat Indonesia yang aman dan sukses. (**)

Dilema Kekuasaan

"Seperti menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Begitulah selayaknya seorang pejabat menjalani proses kepemimpinannya."

Oleh Vebbi Andra, M.Pd.

SIAPA yang tidak mau menjadi pejabat? Dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang serba luar biasa dapat diperolehnya dari negara. Sebenarnya selain hak yang sungguh istimewa ini, pejabat pada dasarnya juga menanggung kewajiban yang tidaklah mudah.

Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pejabat. Pejabat merupakan orang-orang terpilih, yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai penyelenggara negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 memaparkan bahwa yang dinamakan pejabat, itu adalah orang-orang yang menempati posisi sebagai presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, sekretaris, dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan; ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkewajiban sebagai duta luar biasa dan berkonsentrasi penuh; gubernur dan wakil gubernur, bupati, walikota dan wakil bupati/walikota; dan pejabat lainnya yang diatur dalam undang-undang.

UU No. 43 Tahun 1988 tersebut menggariskan dengan jelas, bahwa pentingnya kekuasaan dan jabatan di Indonesia menggunakan prinsip tiga politik (political af-

power), yaitu legislatif (to denking function), eksekutif (rule application function), dan yudikatif (adjudication function).

Pemisahan kekuasaan berdasarkan tiga politik dimaksudkan ialah untuk mencegah terjadinya praktik otoriter dan absolutisme dalam ranah birokrasi. Tiga politik diharapkan memiliki fungsi check and balance yang kuat dan mengikat antar lembaga dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan.

Akhir-akhir ini tiga politik sebagai prinsip ke negara terus sangat terdistorsi. Hal ini karena semakin semakinnya pejabat, baik dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, yang masuk ke dalam lembaga korupsi meniadakan bahwa pelaksanaan tiga politik tidak berjalan sesuai harapan.

Banyak pejabat mulai dari raja-raja kecil di daerah sampai burokrat tinggi di ibu kota, terdiksi terjerbak dalam lingkaran KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pejabat yang dilimpahi kekuasaan malah bertakut melayani terhadap masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Malah sebaliknya telah menentang sikap sebagai pejabat dari pada kepelembagaan.

Pengalaman yang negara yang tidak mampu menegakkan tata tertib dan peraturan terhadap para pejabat telah ditindaklanjuti. Proyek pil-wak yang melibatkan para pejabat, calon-calonnya beserta keluarga dikawal ketat. Proyek kerja yang terencana juga dikawal



ketat dicurangi.

Demikian akibat dari porosi dan terdistorsi, hal hasil menimbulkan kesulitan pembangunan ekonomi, serta membuat kualitas pelayanan dari pemerintahan terpuruk.

Opini di masyarakat yang begitu besar menggambarkan bahwa pada masa sekarang ini sungguh sangat lebih mudah menemukan pejabat yang antagonis, ketimbang menemukan pejabat yang harmonis.

Stigma masyarakat tersebut bukan tanpa alasan yang jelas. Ini tentu saja diperkuat dengan penerapan bahwa banyaknya para pejabat yang mengabdikan fungsi kan pemerintah, dari yang sekedar sebagai wali umum masyarakat dan selanjutnya menjadi antek antek pengasap dalam rakyat.

Dengan begitu sudah sangat penting dan selajaknya, para pejabat yang demikian harus ditindak dikendalikan, dan dijera masuk ke dalam jeruji tahanan dengan baik.

man yang seberat beratnya.

Mereka yang telah menyalahi hati rakyat harus membayar dengan mahal siapa yang telah diperbuatnya. Tidak ada keris dan tegas terhadap pejabat yang sanggup melanggar demi menjamin kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negaranya agar dapat berjalan sesuai bersah dan jujur.

Pejabat yang benar sudah selajaknya dia masiasi, sedangkan pejabat yang korup sudah sepatutnya untuk diberantas. Keadilan pemerintahan korup ini dengan pejabat, antek, penunggu adalah terletak pada ikhtisar dan adanya benak beres untuk melakukan reformasi birokrasi berupa pengawasan yang mengisat, bedagis dan transparan, dan para penguasa. Dengan begitu, diharapkan nantinya tidak ada lagi portogano yang terlibat di kalangan masyarakat mengabaikan pedoman pejabat dengan penjaran. Semoga... (*)

Guru Pahlawan Hati

Oleh Webhi Andra, M.Pd.

"GURU adalah komponen pokok yang utama dalam membangun manusia sebenarnya. Dengan kata lain, guru mempunyai fungsi penting dalam proses memanusiakan manusia, baik dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek keterampilan (psikomotorik), bagi penerus manusia tersebut di masa depan."

GURU adalah pahlawan hati. Itulah ungkapan liris yang dapat diberikan, mengingat peran besar mereka dalam proses membangun bangsa. Digugu dan ditiru merupakan makna penting yang terkandung dalam hakikat guru ini sendiri. Digugu, artinya dipatuhi bahwa guru merupakan anak yang terpercaya dan dapat dipercaya, sedangkan ditiru mengandung arti yang menggambarkan bahwa guru merupakan suri teladan yang selalu patut untuk dijadikan panutan dan contoh.

Guru merupakan salah satu profesi yang mempunyai tugas yang sangatlah mulia. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi guru. Guru merupakan orang-orang pilihan, yang memiliki kedudukan dan peran pokok sebagai pendidik dan pengasah dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang profesional di masa depan, generasi yang siap bersaing pada tingkat globalisasi. Hal ini dikarenakan guru memiliki fungsi yang amat besar untuk mem-

berikan kesadaran kepada peserta didik mengenai kebenaran sebenarnya hidup, memberikan peserta didik kemandirian dan kepekaan kritis, mampu menunjukkan kepada peserta didik tentang hak kehidupan secara universal, dapat memenuhi kebutuhan peserta didik terhadap wahai keindahan, dapat memberikan peserta didik penghayatan yang mendalam terhadap apa yang diketahui, dan bahkan dapat menolong peserta didik ini sendiri menjadi manusia yang berbudaya, yakni manusia yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan, keadilan (Satrio, 2007).

Seorang guru besar pernah menyuguhkan peserta didik, guru pada dasarnya memberikan lima nilai utama pendidikan, yaitu: 1) *learning to be* (The God belief) untuk menghayati keberadaan Tuhan, landasan keimanan dan ketekwaan; 2) *learning to know* (tolak untuk pengetahuan, landasan ilmu pengetahuan); 3) *learning to do* (tolak untuk bekerja, aplikasi); 4) *learning to be* (belajar untuk menjadi), penggalan potensi diri; dan 5) *learning to be together* (belajar untuk hidup bersama dan selaras bersamudaya, hidup berdampingan dan selaras abadi selaras sesama).

Guru yang hebat pada dasarnya adalah guru yang profesional, guru yang kompeten secara metodologi pembelajaran dan keilmuan. Dimana tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menurut Sudarwan (2010) secara umum guru haruslah memiliki kompetensi dasar utama berupa:

1) Kompetensi pedagogik

a) Memahami peserta didik secara mendalam (memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bentuk-tipe awal peserta didik).

b) Merancang pembelajaran, merancang memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran (memahami landasan kependidikan); menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

c) Melaksanakan pembelajaran (menata, mengatur pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif).

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran (merancang dan melaksanakan evaluasi/assessment proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, mastery learning; dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum).

e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya (memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik).

2) Kompetensi kepribadian

a) Kepribadian yang mantap dan stabil (bertidak sesuai dengan norma hukum, bertidak sesuai dengan norma sosial dan bangsa sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma).

b) Kepribadian yang arif (memiliki tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta

memantapkan kerendahan hati dalam bergaul dan bertidak).

c) Kepribadian yang berwibawa (memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani).

d) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan (bertindak sesuai dengan norma agama/iman, takwa, jujur, ikhlas) dan suka menolong, serta memiliki perilaku yang diteladani peserta didik).

3) Kompetensi sosial

a) Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik (berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik).

b) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan (mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan tenaga kependidikan).

c) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar).

d) Mengasai struktur dan metode keilmuan (mengasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi).

Bagitu mulianya peranan guru bagi kemajuan bangsa ini, maka sudah seyogyanya bagi seluruh elemen bangsa untuk memberikan perhatian khusus kepada guru. Baik itu yang berbentuk materi maupun non-materi, guru untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang bermartabat dan unggul. (**)

Ayo Berantas Korupsi

"BERANI Jujur itu hebat, merupakan samboyan yang diusung Indonesia dalam memperingati hari antikorupsi sedunia. Samboyan ini pada dasarnya merupakan ajakan moral bagi masyarakat Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai musuh bersama."

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd

RASA ini ingin menelusur gunung apa daya tangan tak sampai, begitulah kesan yang bisa diungkapkan melihat fenomena korupsi yang terjadi dalam kehidupan birokrasi di Indonesia. Keinginan untuk bersih-bersih birokrasi dari korupsi sungguh sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi pada kenyataannya hobi melakukan korupsi di kalangan birokrat tidak juga berhenti dan semakin hari semakin menjadi-jadi saja. Oleh karena itu, tidak bisa tidak dipanggil lagi kalen birokrasi di Indonesia sangat identik dengan korupsi.

Secara umum dapatlah dipahami bahwa birokrasi di Indonesia sebenarnya telah membangun sistem trias politika (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Di mana pemerintahan terdistribusi pada dasarnya termasuk atas dua elemen penting, yaitu birokrat pegawai negeri dan birokrat bukan pegawai negeri.

Undang-Undang 3 Tahun 1999 menetapkan bahwa pegawai negeri itu adalah orang-orang yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia), dan anggota KNRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan birokrat bukan pegawai negeri ialah orang-orang yang men-

empati posisi sebagai presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ketua, wakil ketua, dan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ketua, wakil ketua, dan anggota MA (Mahkamah Agung) ketua, wakil ketua, dan anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) ketua, wakil ketua, dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ketua dan jabatan setingkat menteri kepala perwakilan RI (Republik Indonesia) di luar negeri yang berkedudukan sebagai dubes luar biasa dan berkedudukan penuh gubernur dan wakil gubernur bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan undang-undang yang ada, birokrat (baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri) sebenarnya merupakan unsur aparatur negara

yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dalam fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan.

Di era sekarang ini, birokrat sebagai ujung tombak pelaksanaan kehidupan berbangsa terasa sungguh sangat terorengi. Kejadian benturan antara birokrat (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) terbelenggu dalam tidak adanya korupsi, menandakan bahwa pelaksanaan birokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Para birokrat mulai dari daerah sampai ibu kota, terdampak terjebak dalam masalah hukum korupsi.

Birokrat yang diharapkan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, malah sebaliknya lebih memengaruhi kepentingan dirinya daripada kepentingan umum. Sikap pragmatis para birokrat ini, sudah barang tentu pada akhirnya menimbulkan kesulitan pembangunan

dan membuat kualitas pelayanan dan pemerintahan terganggu.

Penghilasan birokrasi yang tidak transparan merupakan faktor utama penyebab permasalahan timbulnya korupsi. Proyek-proyek yang melibatkan kepentingan pribadi, dimanipulasi dikecualikan melalui lingkungan kerja yang tertutup guna untuk dapat di gali.

Untuk menegakkan hal tersebut agar tidak terus berlangsung dalam kehidupan birokrasi di Indonesia, maka ada satu-satunya yang harus ditempuh adalah dengan memberikan tindakan keras dan tegas terhadap para birokrat yang melakukan korupsi. Di samping juga, pengawasan yang mengikat dan berapita harus terus dapat ditanggulangi dan demi menjaga terselenggarakannya pemerintahan yang bersih. Sehingga pada akhirnya diharapkan untuk melahirkan kehidupan birokrasi Indonesia yang semakin dapat terwujud dengan baik. (**)



Membangun Kota Pelajar

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

KOTA pelajar adalah kotanya para pelajar. Sebuah kota dengan berbasis pendidikan, yang menggambarkan tingkat keterpelajaran penduduknya yang tinggi. Di mana masyarakat di sana memahami, bahwa penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap pendidikan merupakan dasar penting bagi mereka untuk merespon situasi lokal, nasional, regional, dan global yang

KOTA pelajar adalah sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan dengan bertumpu pada wawasan yang berasal dari teori-teori pendidikan. Sebuah kota yang memiliki suasana dinamis dan hubungan harmonis dengan dunia pendidikan. Kota yang dapat menumbuhkan terjadinya proses interaksi belajar-mengajar yang maksimal bagi masyarakatnya. Kota

yang memahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan penduduknya demi peranannya nanti dalam lingkup pergaulan bermasyarakat. Kota yang mencerminkan bahwa pendidikan itu merupakan satu-satunya cara untuk memajukan manusia, atau dengan kata lain adalah upaya utama untuk membangun manusia seutuhnya.

Untuk menciptakan sebuah kota menjadi kota pelajar, adalah bukan suatu hal yang mudah. Adanya komitmen yang kuat dan rasa optimis yang tinggi dari semua pihak, ialah faktor penting untuk membangun suatu kota menjadi kota pelajar. Sarana-prasarana yang bermutu dan tenaga pendidik yang unggul, merupakan dua hal pokok yang harus tersedia demi berdirinya sebuah kota pelajar.

Menurut Sudarwan (2010) sarana-prasarana yang harus ada guna menjamin keberadaan suatu kota pelajar, antara lain:

a) Tersedianya jenis dan jenjang pendidikan dengan beragam keahlian atau disiplin ilmu yang tidak hanya komplitif, akan tetapi juga relatif sama dengan yang ditawarkan oleh rempah lain.

b) Tersedianya mutu proses dan hasil pendidikan yang secara substansi setara dengan mutu sejenis yang

dicapai di tempat lain.

c) Tersedianya sumber daya internal dan eksternal pendidikan yang memenuhi kriteria jumlah dan kualitas.

d) Tersedianya pusat penjualan buku yang lengkap dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

e) Adanya pusat-pusat informasi yang lengkap, edukatif, dan representatif.

f) Tersedianya lingkungan belajar yang kondusif.

g) Adanya kondisi politik dan ekonomi masyarakat yang baik.

h) Tersedianya jaringan informasi yang bagus.

i) Adanya pemondokan dan biaya hidup yang relatif terjangkau.

j) Tersedianya sarana transportasi yang baik dan terjangkau.

k) Adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk kepentingan pendidikan.

l) Adanya pengakuan yang baik dari berbagai pihak atas hasil dari mutu pendidikan.

Sedangkan dari aspek tenaga pendidik, untuk menciptakan suatu kota pelajar yang bermutu. Sudarwan (2010) berpendapat, bahwa pendidik haruslah memiliki kompetensi, berupa:

a) Kompetensi pedagogik mampu memahami peserta didik secara mendalam; mampu merancang

pembelajaran; termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; mampu melaksanakan pembelajaran; mampu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya).

b) Kompetensi kepribadian (memiliki kepribadian yang mantap dan stabil; memiliki kepribadian yang arif; memiliki kepribadian yang berwibawa; dan memiliki akhlak yang mulia dan dapat dijadikan teladan).

c) Kompetensi sosial (mampu berkomunikasi dan bergaul secara arif dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar; dan yang paling penting, harus juga memiliki kemampuan dalam menguasai struktur dan metode keilmuan).

Melalui keberadaan sarana-prasarana dan tenaga pendidik yang baik dan bermutu, diharapkan nantinya terwujudlah suatu kota pelajar yang unggul. Guna untuk menghasilkan paradigma masyarakat yang cerdas, benar, jujur, dan amanah yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. (*)



DARI KECIL SUDAH
TERBIASA TERIMA
SUAP YA...

Belajar Jati Diri Bangsa Lewat Bahasa

"Asik dan menyenangkan merupakan kunci sukses keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode ini merupakan cara terjitu untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi bahasa Indonesia yang baik. Melalui hal tersebut, diharapkan nantinya tercipta siswa-siswa Indonesia yang arif dalam mempergunakan bahasa Indonesia, khususnya secara efektif dan efisien."

Oleh Vebdi Andra, M.Pd.

BAHASA Indonesia merupakan bidang studi yang mengacu standar kompetensi siswa, berupa kualifikasi kemampuan minimal siswa terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, nasional, regional, dan global (Kemendikbud, 2008). Dengan standar kompetensi ini diharapkan nantinya:

- a) Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya keasrian dan hasil intelektual bangsa sendiri
- b) Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar
- c) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menemukan bahan ajar kebahasaan dan keasrian siswa dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didik
- d) Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan keasrian di sekolah
- e) Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan keasrian sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia
- f) Peserta didik dapat menentukan bahan

dan sumber belajar kebahasaan dan keasrian sesuai dengan kondisi dan kefasihan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Kemendikbud (2008) menyatakan bahwa hal yang terpenting dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berupa:

- a) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis
- b) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara
- c) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan
- d) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial
- e) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa
- f) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual Indonesia

Dengan begitu dapatlah dipahami, bahwa ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia ialah mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek berupa: a) keterampilan menyimak, b) keterampilan berbicara, c) keterampilan membaca, dan d) keterampilan menulis (Kemendikbud, 2008). Secara umum, pembelajaran bahasa Indonesia haruslah memperhatikan hakikat bahasa dan sastra, sebagai sarana komunikasi dari diri siswa terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai suatu bentuk bidang studi yang diarahkan guna meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lisan maupun tulisan, di mana nantinya diharapkan siswa dapat menumbuhkembangkan apresiasi terhadap hasil karya bahasa dan keasrian Indonesia.

- Melihat selama ini proses pembelajaran bahasa Indonesia terhadap siswa berlangsung kurang baik dan menarik. Ditinjau pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan kepada pendekatan tradisional yang cenderung kaku dan monoton, sehingga mengakibatkan ketidaktertarikan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan (Kemendikbud, 2008). Selain pendekatan tradisional cenderung memiliki kesamaan, yaitu:
- a) Siswa lebih berperan sebagai

secara pasif dan siswa belajar secara individual.

b) Pembelajaran sangat abstrak dan teoritik, serta perilaku dibenarkan atas kebiasaan.

c) Bahasa diajarkan dengan pendekatan simbolis rumus diterapkan sampai paham, kemudian dihafalkan (drill).

d) Pengetahuan adalah penangkap terhadap serangkaian fakta, konsep, atau hukum yang berada di luar diri manusia, dan kebenaran bersifat absolut serta pengetahuan bersifat final.

e) Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran dan pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman siswa.

f) Hasil belajar diukur hanya dengan tes dan pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas.

Dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan, di mana kurikulum yang akan diterapkan nanti adalah kurikulum 2013, maka dengan begitu juga diperlukan suatu perubahan besar dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, seiring dengan adanya perubahan kurikulum ini, maka untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif di sekolah diperlukan suatu model baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di mana model yang sangat tepat dan sesuai untuk diterapkan, yaitu berupa pembelajaran dengan model kuantum.

Model kuantum sebagai suatu model dalam pembelajaran telah digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehingga memudahkan jalannya proses belajar-mengajar. Pembelajaran dengan model kuantum menekankan pada delapan kunci keunggulan, yaitu: a) integritas (kejujuran), b) kepatuhan awal keseluruhan, c) disiplin dengan niat baik, d) hidup di saat ini, e) komitmen, f) tanggung jawab, g) sikap jujur, h) keberanian, dan i) kesederhanaan (DePorter dkk., 2004).

Sebagai metode pembelajaran, model kuantum merupakan konsep belajar yang digunakan untuk menghasilkan proses belajar-mengajar yang asik dan menyenangkan. Menurut DePorter dkk. (2004), model kuantum memusatkan fokus pengajaran dan strateginya pada kemuliaan manusia yang dimulai sebagai TAKDUNG, yaitu:

- a) Tumbuhkan yang maksudnya tumbuhkan minat dengan memusatkan perhatian manakala belajar, dan memfasilitasi kesempatan belajar
- b) Akut, yang maksudnya dipekerjakan atau ditugaskan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua belajar
- c) Nama yang maksudnya sampaikan kata, nilai, konsep, model, rumus, strategi atau sebuah masalah
- d) Demonstrasikan, yang maksudnya

sedikan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu.

e) Ulangi, yang maksudnya tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan, jika tahu bahwa dia memang tahu ini.

f) Rayakan yang maksudnya pengakuan untuk penyediaan, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan.

Sebagai model yang dikembangkan dan bertumpu pada wawasan yang berasal dari teori-teori pendidikan, pembelajaran model kuantum berorientasi pada prinsip bahwa pemahaman terbentuk melalui hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Di mana inti dari pembelajaran model kuantum berpusat pada asas utama kegiatan pendidikan, yaitu "Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan Antarlah Dunia Kita ke Dunia Mereka". DePorter dkk. (2004) berpendapat bahwa, pada prinsipnya model kuantum berorientasi pada suasana pembelajaran yang menggairahkan, di mana hal tersebut terwujud atas enam komponen, yaitu:

- a) Kekuatan terpendam nilai
- b) Jajaran misi singkat dan saling penguatan
- c) Kerjasama dan keterlibatan
- d) Pengaruh nilai positif
- e) Rasa saling memaafkan
- f) Keterbacaan

DePorter dkk. (2004) menyatakan bahwa model kuantum adalah penggabungan belajar yang efektif, dengan segala suasananya yang menyebarkan segala salitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar, serta berfokus pada hubungan timbal balik dalam lingkungan kelas hingga memunculkan interaksi yang mendidik, landasan dan kerangka untuk belajar. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa model kuantum merupakan pembelajaran yang benar-benar dalam suasana yang meriah, dengan tujuan untuk memunculkan lingkungan belajar yang efektif hingga memudahkan terjadinya proses belajar.

Melalui pembelajaran dengan model kuantum ini diharapkan nantinya hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia dapat meningkat. Sehingga informasi dari mata pelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai oleh siswa yaitu berupa penguasaan, penguasaan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya. Serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya keasrian, keasrian, dan hasil intelektual bangsa sendiri sesuai faktor utama penguasaan diri diri bangsa Indonesia. (*)

Idealisme Setengah Hati

Oleh: Vebbi Andra, M.Pd.

"CERDAS, benar, jujur, dan amanah begitulah sepatutnya sikap para birokrat dalam menjalankan tugas kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan yang dimilikinya."

MENJADI birokrat merupakan impian setiap orang. Hal ini dikarenakan, adanya opini bahwa profesi sebagai birokrat merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Pada dasarnya, birokrat merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam peranannya sebagai penyelenggara tugas negara.

Secara umum, birokrat mempunyai kewajiban yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, dapatlah dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi birokrat. Birokrat merupakan orang-orang terpilih, yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai penyelenggara pemerintahan.

Sebenarnya suatu pemerintahan yang baik (good governance), wajiblah dipimpin oleh birokrat yang merakyat. Yang mana birokrat tersebut, merupakan bagian dari masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan secara profesional, dalam fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, bahwa unsur-unsur penting yang harus tergaruh dari suatu kepemimpinan birokrat yang merakyat antara lain: a) adanya wawasan kedepan, b) adanya keterbukaan dan transparansi, c) adanya partisipasi dari masyarakat, d) adanya tanggung gugat, e) adanya supremasi hukum, f) adanya demokrasi, g) adanya profesionalisme dan kompetensi, h) adanya daya tanggap, i) adanya keefisienan dan keefektifan, j) adanya desentralisasi, k) adanya kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, l) adanya komitmen pada pengurangan kesenjangan, m) adanya komitmen pada lingkungan hidup, dan n) adanya komitmen pada pasar yang lair.

Menurut Soeharto dan Nasri (2009) untuk mewujudkan suatu kepemimpinan birokrat yang merakyat, adalah bukan suatu perkara yang mudah. Oleh karena, hal tersebut memerlukan dukungan dari beberapa faktor, yang di antaranya: a) adanya suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, b) adanya daya tahan yang lama dalam proses pelaksanaannya, c) adanya waktu yang tidak singkat dalam tahapan pembelajaran dan pemahamannya, d) adanya implementasi dari nilai-nilai tata pemerintahan yang ada oleh seluruh elemen bangsa, dan e) adanya kesepakatan bersama dan rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang 43 tahun 1999 menetapkan, bahwa

birokrat itu sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan anggota KNEI (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Serta orang-orang yang menempati posisi sebagai presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat); ketua, wakil ketua, dan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); ketua, wakil ketua, dan anggota MA (Mahkamah Agung); ketua, wakil ketua, dan anggota DPA/Wantimpres (Dewan Pertimbangan Agung/Dewan Pertimbangan Presiden); ketua, wakil ketua, dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan); menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala perwakilan RI (Republik Indonesia) di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/walikota; dan jabatan lainnya yang ditentukan undang-undang.

Melihat gambaran yang ada, birokrat di Indonesia dapatlah digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu birokrat dari kalangan legislatif, birokrat dari kalangan eksekutif, dan birokrat dari kalangan yudikatif. Pemisahan birokrat ke dalam kelompok-kelompok ini, dimaksudkan ialah untuk menumbuhkembangkan sikap saling awas-mengawasi dan mencegah terjadinya praktik yang tidak benar dalam ranah birokrasi.

Di zaman demokrasi seperti sekarang ini, birokrat yang pada

dasarnya merupakan bagian dari kehidupan bernegara terus-menerus sangat ternistakan. Peristiwa banyaknya kasus birokrat (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang terbelenggu praktik korupsi, secara umum sebenarnya ialah menggambarkan sikap para birokrat yang berjiwa tak murni atau dengan kata lain memiliki idealisme setengah hati. Para birokrat mulai dari tataran yang terendah sampai dengan tataran yang tertinggi, terindikasi terjebak dalam lingkaran korupsi. Kasus birokrat yang diharapkan bertugas memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, ternyata malah lebih mementingkan kepentingan individunya.

Pengelolaan uang negara yang tidak jujur, merupakan faktor penting penyebab para birokrat terdapat tindakan korupsi. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan uang dalam jumlah besar, dikelola melalui cara kerja yang tertutup guna untuk dapat dikorup. Tentu saja akibat dari perbuatan tersebut, menyebabkan kualitas pelayanan dari pemerintahan menjadi tidak baik.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para birokrat yang korup untuk disingkirkan. Keberhasilan pemberantasan korupsi di kalangan birokrat, faktanya adalah terletak pada kemauan bersama untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan keterbukaan. Dengan begitu, diharapkan nantinya tercipta kehidupan birokrasi yang jujur dan bersih di Negeri Indonesia yang tercinta ini. (**)